

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Distribusi frekuensi ketahanan komunitas antara kelurahan Tangguh Bencana dan Non Tangguh Bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana menunjukkan bahwa ketahanan komunitas di Kelurahan Non Tangguh Bencana lebih tinggi dibandingkan Kelurahan Tangguh Bencana.
2. Terdapat perbedaan ketahanan komunitas antara Kelurahan Tangguh Bencana dan Non Tangguh Bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Padang.
3. Tidak terdapat perbedaan hubungan usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, dan pendapatan keluarga dengan ketahanan komunitas antara Kelurahan Tangguh Bencana dan Non Tangguh Bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Padang.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah
 - a. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program Kelurahan Tangguh Bencana secara berkelanjutan

Pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti BPBD perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program ini, melalui rapat monitoring dan evaluasi yang melibatkan BPBD, tokoh masyarakat, Kelompok Siaga Bencana, dan pihak terkait. Monitoring dan evaluasi tersebut sebaiknya tidak hanya fokus pada

aspek administratif, tetapi juga melihat dari peningkatan kapasitas masyarakat umum yang dilihat dari keterlibatan komunitas dalam pengurangan risiko bencana, keberhasilan mobilisasi sumber daya lokal, dan efektivitas pelatihan bagi fasilitator lokal dalam meneruskan informasi kepada masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada pendamping eksternal, sehingga dapat mendukung keberlanjutan program Kelurahan Tangguh Bencana.

Pemerintah setempat dan BPBD juga harus memastikan apakah informasi terkait kebencanaan yang telah disampaikan ke fasilitator, seperti Kelompok Siaga Bencana disampaikan secara merata kepada masyarakat umum, melalui sistem umpan balik berbasis formulir atau aplikasi sederhana agar masyarakat dapat melaporkan kekurangan dan keberhasilan program secara langsung.

b. Mengaktifkan forum komunitas secara rutin

Pemerintah setempat atau tingkat RT/RW dapat menjadwalkan pertemuan forum komunitas, seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Forum Pengelolaan Risiko Bencana (PRB) setiap bulan untuk membahas isu sosial dan kesiapsiagaan agar informasi dapat tersampaikan dengan efektif dan koordinasi antarwarga dan pemerintah dapat terjalin dengan baik dalam upaya meningkatkan ketahanan komunitas. Selain itu, pemerintah setempat dapat menyelenggarakan kegiatan sosial, seperti gotong royong setiap minggu untuk meningkatkan ikatan sosial komunitas dan memperkuat rasa kebersamaan.

Pemerintah setempat dan BPBD juga dapat membentuk dan mengaktifkan Tim Reaksi Cepat di tingkat kelurahan untuk program tanggap darurat dengan pembagian tugas yang jelas, seperti evakuasi, medis, logistik, dan keamanan. Selain itu, pemerintah setempat dan BPBD dapat menyusun perencanaan program pemulihan pasca bencana, seperti perbaikan infrastruktur dan pendampingan psikososial.

c. Peningkatan akses sumber daya

Pemerintah setempat dapat membuat daftar kebutuhan prioritas setiap kelurahan, terutama terkait mitigasi bencana, seperti alat peringatan dini yang memadai dan alat evakuasi. Selain itu, pemerintah setempat dapat menyediakan atau membuat estimasi anggaran khusus dari APBD atau APBN untuk melengkapi kebutuhan dasar komunitas dan memelihara peralatan yang telah tersedia.

d. Penguatan kepemimpinan

Pemerintah setempat mengadakan pelatihan kepemimpinan bagi tokoh masyarakat dan perangkat pemerintahan untuk meningkatkan efektifitas pemimpin, terutama efektifitas dalam manajemen bencana. Tidak hanya terbatas pada pemangku jabatan, masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses penguatan kepemimpinan ini. Hal ini penting untuk memastikan adanya kolaborasi yang solid antara pemimpin dan masyarakat dalam membangun ketahanan menghadapi bencana.

e. Dukungan terhadap komunitas untuk pembangunan kemitraan dengan *stakeholder* terkait

Pemerintah setempat memberikan dukungan aktif kepada masyarakat dalam membangun kemitraan dengan *stakeholder* terkait, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, atau sektor swasta. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui fasilitasi forum kolaborasi antar stakeholder untuk menyusun program bersama, pendampingan teknis pada komunitas agar mampu mengelola kemitraan secara mandiri dan berkelanjutan, serta pemberian akses informasi dan sumber daya yang dibutuhkan komunitas.

f. Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan

Pemerintah setempat menyelenggarakan program pelatihan kebencanaan secara rutin, seperti pelatihan tanggap darurat, pertolongan pertama, serta pelatihan kesehatan dan sanitasi agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan, mampu merespons dengan cepat dan tepat saat terjadi bencana, serta meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan komunitas, seperti pelatihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) agar masyarakat dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, menciptakan peluang usaha mandiri, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan sosial dan finansial, khususnya dalam menghadapi dampak pasca bencana.

2. Bagi Masyarakat

a. Aktif dalam kegiatan komunitas dan forum kebencanaan

Masyarakat ikut serta dalam kegiatan sosial, seperti kegiatan gotong royong agar dapat mengembangkan kesadaran risiko dan memperkuat keterikatan antar komunitas dan menumbuhkan solidaritas sehingga membentuk ketahanan komunitas. Selain itu, masyarakat juga ikut terlibat dalam forum lokal, seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Forum Pengelolaan Risiko Bencana (PRB), serta ikut terlibat dalam pelatihan kebencanaan dan keterampilan agar dapat meningkatkan kesadaran, memperkuat koordinasi, dan mempersiapkan diri secara lebih baik dalam menghadapi bencana.

b. Pemeliharaan sumber daya

Masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga dan merawat sumber daya kebencanaan, seperti alat evakuasi dan sistem peringatan dini. Masyarakat dapat membentuk kelompok kerja atau relawan khusus yang bertugas memeriksa kondisi peralatan secara berkala, melakukan pembersihan, dan melaporkan kerusakan kepada pihak terkait. Pemeriksaan bisa dilakukan rutin, misalnya sebulan sekali.

c. Pembangunan kemitraan dan kolaborasi

Masyarakat setempat memperkuat kemitraan dengan organisasi luar komunitas, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, atau sektor swasta yang dapat mendukung penyediaan logistik, edukasi kebencanaan, dan pelatihan terkait kebencanaan atau keterampilan komunitas.

Pembangunan kemitraan ini dapat diwujudkan dengan cara membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pihak

terkait agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan jelas serta menjaga komitmen dan tangguh jawab dalam setiap kegiatan kemitraan agar hasil yang dicapai dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

d. Dorong transparansi dan akuntabilitas program pemerintah

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengevaluasi program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan kebencanaan. Oleh karena itu, masyarakat dapat ikut serta dalam rapat kelurahan atau forum komunitas saat membahas kegiatan kebencanaan dan harus berani memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan, agar kegiatan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berjalan secara efektif. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi, maka kepercayaan kepada pejabat publik juga dapat terbangun, karena masyarakat merasa dilibatkan dan melihat adanya komitmen untuk melayani secara jujur dan bertanggung jawab.

